

**KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I: PENGGUNAAN AYAT-AYAT
AL-QUR'AN DALAM POLITIK PRAKTIS**

SKRIPSI



Annisa Bilah Izzah Kholilah

Nim. 204104010025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
MEI 2025**

**KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I: PENGGUNAAN AYAT-AYAT
AL-QUR'AN DALAM POLITIK PRAKTIS**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
Oleh:
Annisa Bilah Izzah Kholilah
Nim. 204104010025

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
MEI 2025**

**KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I: PENGGUNAAN AYAT-AYAT
AL-QUR'AN DALAM POLITIK PRAKTIS**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Annisa Bilah Izzah Kholilah
NIM. 204104010025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing

Dr. H. Imam Bofiol Juhari, M.Si.
NIP.197606111999031006

**KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I: PENGGUNAAN AYAT-AYAT
AL-QUR'AN DALAM POLITIK PRAKTIS**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

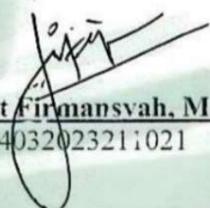
Hari: Rabu
Tanggal : 21 Mei 2025

Tim penguji

Ketua

Sekretaris


Abdullah Dardum, M.Th.I.
NIP. 198707172019031006


Irfa' Asv'at Firmansyah, M.Pd.I.
NIP. 198504032023211021

Anggota:

1. H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A. 

2. Dr. H. Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Si 

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

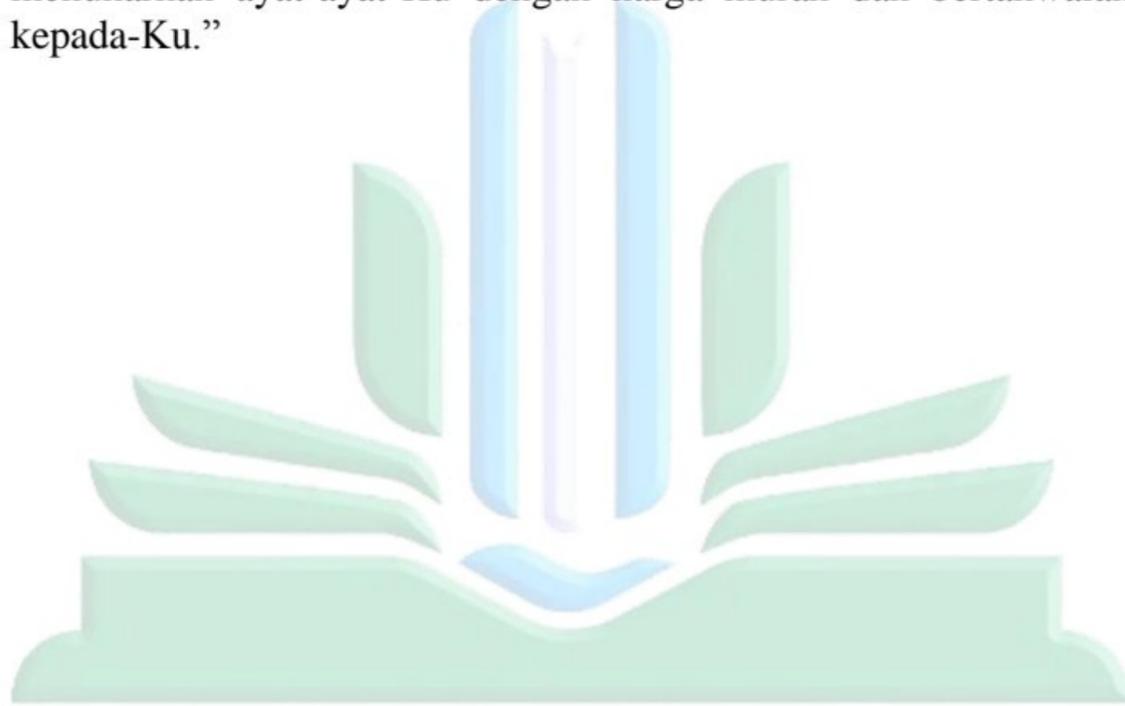



Dr. Ahidul Asror, M.Ag.
NIP. 197406062000031003

MOTTO

وَأْمِنُوا بِمَا آتَيْنَاكُمْ مَصَدَقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰ كَافِرِينَ بِهِ ۗ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا
قَلِيلًا ۗ وَأَيُّكُمْ فَاتَّقُونَ

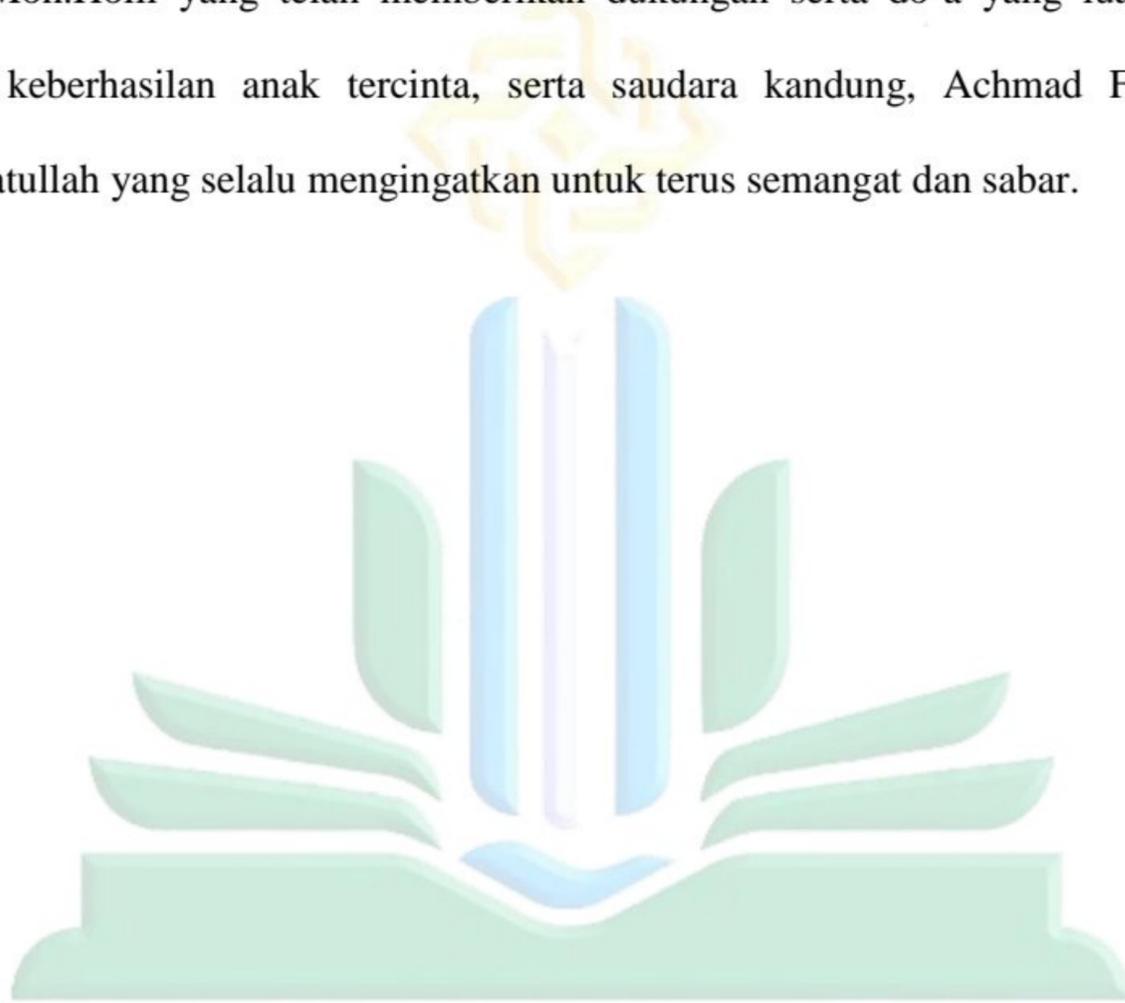
Artinya: “Berimanlah kamu kepada apa (Al-Qur`an) yang telah Aku turunkan sebagai pembenar bagi apa yang ada pada kamu (Taurat) dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga murah dan bertakwalah hanya kepada-Ku.”



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, ummi Diah Pytasari dan abah Moh.Holil yang telah memberikan dukungan serta do`a yang luar biasa untuk keberhasilan anak tercinta, serta saudara kandung, Achmad Fayakun Hidayatullah yang selalu mengingatkan untuk terus semangat dan sabar.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Segala puji dan ucapan syukur hanya kepada Allah Swt tuhan yang maha pengasih lagi penyayang terhadap semua ciptaannya. Sebab rahmat, hidayah serta pertolongan yang telah Allah limpahkan, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan hasil yang diharapkan.

Sholawat salam tercurahkan kepada satu-satunya manusia teragung di dunia dan akhirat, pemberi syafaat di hari kiamat yakni baginda Nabi Muhammad Saw yang selalu membawa lentera kehidupan serta menjadi tauladan bagi ummat untuk meningkatkan nilai keimanan dan keilmuan.

Sedari awal penulis menyadari bahwa manusia tidak bisa hidup dengan hanya mengandalkan kemampuan dirinya sendiri, yang mana demikian sudah menjadi sunnatullah bagi manusia sebagai mahluk sosial. Begitu pula dalam proses dari awal penelitian ini tidak lepas dari dorongan, bimbingan dari banyak pihak, oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada:

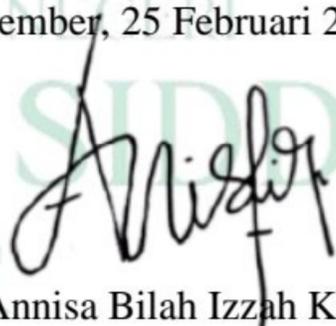
1. Prof. Dr. H Hepni S.Ag., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS).
2. Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab, dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS).
3. Abdulloh Dardum, S.Th.I., Ketua program studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab, dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Dr. H. Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Si., Dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi, yang telah mendampingi dan memberikan pengarahan dari sejak awal perkuliahan, serta membimbing dan banyak memberikan pengarahan dari awal pembuatan skripsi sampai selesai.
5. Keluarga besar kelas IAT 02 angkatan 2020 yang telah menjadi bagian dari penyemangat perjuangan menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember.

Harapan penulis semoga Allah Swt selalu memberikan kesehatan, keberkahan, serta dikabulkan apa yang menjadi segala hajat keinginannya. Semoga tulisan yang sederhana ini memberikan nilai manfaat bagi pembaca. Saya ucapkan Jazākumullāh aḥsanal jazā.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 25 Februari 2025



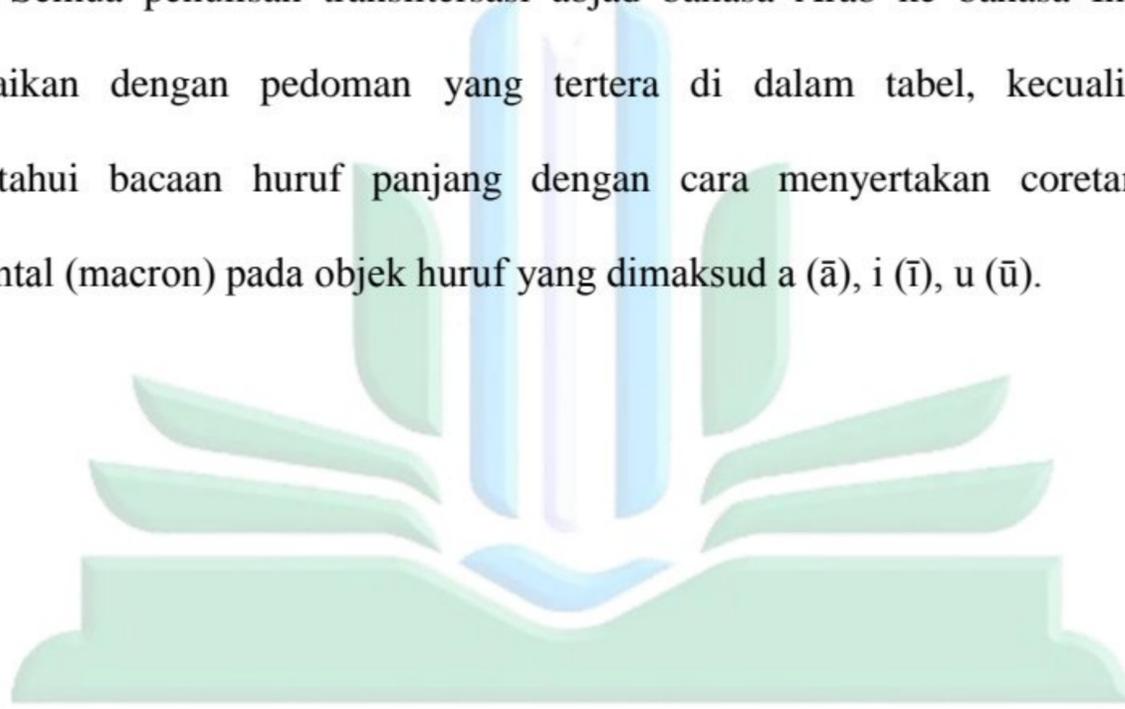
Annisa Bilah Izzah Kholilah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	b
ت	ت	ت	ت	t
ث	ث	ث	ث	th
ج	ج	ج	ج	j
ح	ح	ح	ح	h
خ	خ	خ	خ	kh
د	د	د	د	d
ذ	ذ	ذ	ذ	dh
ر	ر	ر	ر	r
ز	ز	ز	ز	z
س	س	س	س	s
ش	ش	ش	ش	sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	.(ayn)
غ	غ	غ	غ	gh
ف	ف	ف	ف	f
ق	ق	ق	ق	q
ك	ك	ك	ك	k
ل	ل	ل	ل	l

م	م	م	م	m
ن	ن	ن	ن	n
هـ	هـ	هـ, هـ	هـ, هـ	h
و	و	و	و	w
ي	ي	ي	ي	y

Semua penulisan transliterasi abjad bahasa Arab ke bahasa Indonesia disesuaikan dengan pedoman yang tertera di dalam tabel, kecuali untuk mengetahui bacaan huruf panjang dengan cara menyertakan coretan garis horizontal (macron) pada objek huruf yang dimaksud a (ā), i (ī), u (ū).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Annisa Bilah Izzah Kholilah, 2025: Kajian Tafsir Maudhu'i: Penggunaan Ayat-Ayat Al-Qur'an dalam Politik Praktis

Kata Kunci: Tafsir Maudhu'i, Nilai Politik, Ayat Al-Qur'an, dan Politik Praktis.

Fenomena penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an dalam politik praktis di Indonesia semakin marak, khususnya pada masa kampanye dan kontestasi politik. Praktik ini menimbulkan keprihatinan karena ayat-ayat Al-Qur'an sering digunakan secara parsial dan di luar konteks demi kepentingan politik sesaat, sehingga mencederai nilai-nilai luhur dan prinsip dasar Islam seperti keadilan, musyawarah, dan amanah. Al-Qur'an sebagai hudan linnas (petunjuk bagi manusia) seharusnya menjadi sumber rujukan aqidah dan etika dalam berpolitik, bukan sekadar alat legitimasi untuk meraih dukungan.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi nilai-nilai politik dalam perspektif Al-Qur'an serta menganalisis penafsiran dan penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an yang sering dijadikan rujukan dalam politik praktis. Penelitian ini juga menelaah bagaimana penafsiran tersebut dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap politik dan agama, serta dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan ayat-ayat suci dalam ruang publik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) dan analisis deskriptif-analitis. Teori tafsir maudhu'i (tematik) digunakan untuk mengkaji ayat-ayat yang relevan dengan isu politik, seperti QS. Al-Baqarah ayat 41, QS. An-Nisa' ayat 58, dan QS. Al-Ma'idah ayat 8. Selain itu, penelitian ini juga didukung teori social relation untuk memahami interaksi sosial-politik dalam penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an di ruang publik, serta mengkaji pandangan para ulama dan tokoh agama terkait fenomena tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an dalam politik praktis sering kali dilakukan secara tidak utuh dan tidak kontekstual, sehingga menimbulkan penafsiran yang bias dan manipulatif. Selain itu, ditemukan bahwa Al-Qur'an secara tegas menekankan pentingnya keadilan, amanah, musyawarah, persamaan, dan larangan penyalahgunaan wahyu untuk kepentingan duniawi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap Al-Qur'an serta penguatan literasi dan etika politik berbasis nilai-nilai agama agar ayat-ayat suci tidak lagi disalahgunakan dalam politik praktis.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	20

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	20
B. Sumber Data.....	21
C. Teknik Pengumpulan Data.....	21
D. Teknik Analisis Data.....	21
E. Keabsahan Data.....	22
F. Tahap-Tahap Penelitian	22
BAB IV PEMBAHASAN.....	25
A. Nilai-Nilai Politik dalam Al-Qur`an	25
B. Penafsiran terhadap Penggunaan Ayat-Ayat Politik Praktis.....	32
BAB IV PENUTUP	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	43

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

2.1 Persamaan dan Perbedaan Studi Terdahulu..... 15



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Al-Qur`an dikenal atau hadir sebagai *hudan linnas* (petunjuk bagi manusia) dan sebagai kitab yang diturunkan agar manusia keluar dari kegelapan menuju terang benderang. Al-Qur`an juga telah memerintahkan umat manusia untuk mempelajari dan memahaminya sehingga mereka akan dapat menemukan sesuatu melalui petunjuk-petunjuknya yang tersurat dan tersirat, dan bisa mengantarkan mereka menuju terang benderang.¹ Al-Qur`an juga merupakan kitab yang harus dijadikan sumber rujukan aqidah, yang telah tertancap pertama kali di permukaan bumi dan menghapus jahiliyah serta menjadikan kita sebaik-baik umat yang ditampilkan untuk kebaikan manusia. Itulah wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian beliau ajarkan kepada manusia dan menjadikan kader-kader aqidah yang sebenarnya. Selain itu juga, cara Al-Qur`an dalam menjelaskan aqidah merupakan sebaik-baik cara yang sangat sempurna.²

Al-Qur'an, kitab suci umat Islam, memberikan ajaran moral dan spiritual serta prinsip-prinsip penting untuk kehidupan masyarakat, termasuk politik. Selama sejarah pemikiran Islam, politik dianggap sebagai komponen penting dari ajaran agama dengan tujuan mewujudkan

¹ Quraish Shihab, "Membumikan al-Qur`an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat" (Bandung: Mizan, 1999), 92.

² Leni Nuraeni, "Imbalan Ceramah Agama Kajian (Penafsiran Q.S.Al-Baqarah/2: 41 Menurut Ibn Katsir Dan Sayyid Qutb)", (Skripsi, UIN Jakarta, 2017), 1

keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi semua orang. Para ulama dan cendekiawan telah menyelidiki ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan politik, baik dalam konteks klasik maupun kontemporer, untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip ilahiah dapat diterapkan dalam praktik politik kontemporer.

Salah satu yang menjadi perhatian yang amat penting dalam al-Quran adalah ayat-ayat yang mengatur tentang hubungan antar manusia (*hablummin al-nās*), yang disebut dengan hubungan sosial (*social relation*). Hubungan antara satu individu dengan individu yang lain dalam sebuah komunitas tentu memerlukan aturan dan petunjuk. Maka dari itu, dengan adanya hubungan sosial (*social relation*) akan membentuk yang namanya 'politik'.

Sudah banyak penjelasan dan pembahasan bahwa Islam telah mengatur prinsip-prinsip dasar politik yang seharusnya bisa menjadi acuan atau landasan seseorang dalam menjalankan roda pemerintahan yakni, keadilan, musyawarah, toleransi, hak-hak kewajiban, amanah, dan kejujuran.

Akan tetapi, kenyataan yang dapat dilihat pada zaman sekarang sangat berbanding terbalik bahkan mengabaikan prinsip-prinsip dasar politik yang ada. Saat ini, persoalan politik cenderung ke arah negatif bahkan seringkali dikaitkan dengan persoalan-persoalan yang berada di luar

lingkup agama itu sendiri, bahkan banyak orang seringkali menggunakan ayat-ayat Al-Qur`an hanya untuk mendapatkan banyak dukungan suara.³

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa kondisi politik saat ini sudah terbelah menyelerang dari prinsip-prinsip dasar politik bahkan tidak mengikuti aturan yang telah diajarkan dalam Islam. Fenomena penggunaan ayat-ayat Al-Qur`an seperti ini terlihat sangat menonjol pada momen atau permasalahan politik seperti pemilu. Fenomena penggunaan ayat-ayat Al-Qur`an seringkali terlihat di setiap acara pesta rakyat pemilu, bagaimana agama itu dijadikan alat atau senjata untuk kepentingan pemenang kekuasaan. Seperti pada tahap pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden yang banyak memanfaatkan tokoh-tokoh agama atau ulama, hingga pada tahap kampanye banyak perkataan-perkataan yang berkaitan dengan agama serta ayat-ayat Al-Qur`an yang dilontarkan hanya untuk memperoleh suara terbanyak.⁴

Praktik politisasi ayat-ayat Al-Qur`an ini tidak hanya menimbulkan kegaduhan di ruang publik, tetapi juga berpotensi memperkeruh suasana demokrasi dan merusak nilai-nilai luhur agama. Dalam konteks regulasi, Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2017 Pasal 280 telah secara tegas melarang penggunaan simbol-simbol agama secara berlebihan dalam kampanye politik, karena dapat memicu konflik horizontal dan mengancam persatuan bangsa. Namun, pada kenyataannya,

³ Rosidatul Hasanah, "Komodifikasi Agama Dalam Kampanye Pilpres 2019 (Analisis Pesan Kampanye Di Situs Youtube)", Skripsi, Mahasiswa Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020, 1.

⁴ Al-Qurtuby, "Sejarah Politik Politisasi Agama dan Dampaknya di Indonesia". MAARIF, 13(2) 2018, 43-54.

simbol dan ayat-ayat agama masih kerap dijadikan alat untuk memuluskan kepentingan politik kelompok tertentu.

Akan tetapi, sejak reformasi digulirkan, hingga saat ini demokrasi menjadi ajang kebebasan berpolitik yang terkadang hanya mengarah kepada kegaduhan semata.⁵ Kenyataan yang dapat dilihat pada zaman sekarang sangat berbanding terbalik bahkan mengabaikan prinsip-prinsip dasar politik yang ada. Persoalan politik cenderung ke arah negatif yang dimana pada saat ini dalam berpolitik contohnya pada saat berkampanye, ayat-ayat Al-Qur`an cenderung menjadi sasaran para oknum tidak bertanggung jawab yang kemudian disalahgunakan. Berkampanye dengan syiar-syiar Islam ini seperti menipu, seolah-olah calon pemimpin itu sedang menawarkan Islam. Tujuannya dapat diketahui bersama, yaitu untuk meraih kedudukan, banyak kebijakannya tidak bergantung pada isi Al-Qur`an.⁶

Satu aspek penting lagi yang tidak boleh terlupakan adalah mengenai sisi Al-Qur`an itu sendiri. Selain daripada penelitian mengenai penggunaan ayat-ayat Al-Qur`an dalam politik praktis ini akan dibawa kepada ranah penafsiran ayat-ayat Al-Qur`an, sebagaimana kita lihat gejala yang terjadi di masyarakat pun tidak jauh daripada Al-Qur`an. Di mana kelompok-kelompok yang menampakkan identitas agama akan menyuarakan suara mereka dengan ayat-ayat Al-Qur`an. Tanpa peduli

⁵ Zaenal A. Budiyono, „Memimpin Di Era Politik Gaduh“ (Jakarta: Dcsc Publishing, 2012), I

⁶ Indri Anggraeni, “Penggunaan Simbol Agama Dalam Kampanye Pemilihan Umum Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif”, Skripsi, Mahasiswa Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021, 5-6.

kajian lebih lanjut mengenai ayat-ayat yang mereka bunyikan sudah terlebih dahulu dipahami ataupun belum, yang terpenting adalah legitimasi ayat ada di tangan mereka. Tentunya ini pun berdasarkan pada argumentasi dan legitimasi sepihak.

Dalam memahami Ayat Al-Qur`an dibutuhkan pembelajaran yang mendalam dan matang sehingga Ayat-ayat Al-Qur`an tidak dimaknai secara sepihak, apalagi sampai membenarkan penjelasan sendiri lalu menghakimi penjelasan ayat yang berbeda paham. Hal seperti inilah yang sejatinya dapat mencederai daripada penafsiran Al-Qur`an itu sendiri.

Oleh karena itu penulis merasa sangat perlu untuk mengkaji lebih lanjut terkait penggunaan ayat-ayat Al-Qur`an dalam politik praktis agar masyarakat tidak terus menerus berada dalam kebingungan terkait ayat-ayat yang dikaitkan dengan urusan politik. Lebih jauh lagi, jangan sampai berangkat dari pemahaman yang kurang utuh terhadap sebuah ayat dalam Al-Qur`an akan melahirkan perpecahan dalam skala yang besar atas nama Agama, lebih spesifik lagi atas nama Al-Qur`an.

Al-Qur`an kerap dipaksakan dari segi pemaknaannya demi menyukseskan agenda tertentu, terutama politik. Karena polarisasi yang dilakukan ini dinilai cukup berhasil dalam beberapa waktu untuk melakukan sebuah kemenangan dalam kontestasi politik. Kesadaran yang perlu dibangun adalah bahwa Al-Qur`an harus dipahami secara utuh dan komprehensif agar tidak terjadi penyelewengan makna dan tetap terjaga nilai-nilainya.

Inilah hal-hal penting yang mendasari pemikiran penulis untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait penggunaan ayat-ayat Al-Qur`an dalam politik praktis, sehingga akan tercapainya pemahaman yang utuh dalam memahami realita politik yang bergulir di masyarakat dalam bingkai Al-Qur`an.⁷

Penggunaan ayat-ayat Al-Qur`an dalam politik praktis dapat dilihat dalam berbagai kasus, penulis mengutip QS. Al-Baqarah ayat 41 tentang keimanan dan kebenaran wahyu, QS. Al-Baqarah ayat 42 tentang kejujuran dan integritas dalam menyampaikan kebenaran, QS. An-Nisa` ayat 58 tentang Amanah dan keadilan, serta QS. Al-Maidah ayat 8 tentang keadilan sebagai sikap yang dekat dengan takwa. Ayat-ayat ini sering dijadikan slogan atau alat legitimasi dalam berbagai pidato maupun kampanye politik. Padahal secara normatif, Al-Qur`an juga mengingatkan agar ayat-ayat Allah tidak diperdagangkan untuk kepentingan duniawi.

Oleh karena itu, penulis ingin menguak lebih detail dan mendalam mengenai makna dari penggunaan ayat-ayat Al-Qur`an dalam politik praktis menggunakan metode tafsir maudhu`i (tematik) dengan cara mengumpulkan semua ayat-ayat Al-Qur`an yang berkaitan atau membahas tentang permasalahan tersebut, yang dapat dilakukan dengan cara mencari ayat-ayat yang berkaitan, kemudian menggambarkan secara terperinci, dan membantu meringkas poin-poin penting di dalamnya sehingga dapat berkembang atau memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

⁷ Muhammad Muis, "Politik Identitas Perspektif Al-Qur`an (Kajian Tematik Ayat-Ayat Politik Identitas dalam Al-Qur`an)", *Skripsi*, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur`an Jakarta, 2020, 14-15.

Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai makna dan konteks ayat-ayat tersebut, serta menawarkan solusi agar penggunaan ayat-ayat Al-Qur`an dalam politik tetap berada dalam koridor etika dan nilai-nilai luhur Islam.

Berdasarkan uraian di atas, pembahasan tentang penggunaan ayat-ayat Al-Qur`an dalam politik ini sangat penting dan menarik untuk dikaji. Penulis merasa tertarik dalam mengetahui maksud dari penggunaan ayat-ayat Al-Qur`an dalam politik praktis, dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur`an dengan cara menggambarkan, merangkum, dan meringkasnya menjadi lebih mudah dipahami dan perlu dikaji secara mendalam. Maka dari itu, penulis mengambil judul ***“Kajian Tafsir Maudhu`i: Penggunaan Ayat-Ayat Al-Qur'an dalam Politik Praktis”***

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana nilai-nilai politik dalam perspektif Al-Qur`an?
2. Bagaimana analisis serta penafsiran Al-Qur`an terkait penggunaan ayat-ayat politik praktis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui nilai-nilai politik dalam perspektif Al-Qur`an
2. Untuk mengkaji ayat-ayat dan menafsirkannya secara eksplisit yang dapat mudah dipahami.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisis tentang kontribusi yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.⁸ Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menjadi salah satu kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang penggunaan ayat-ayat Al-Qur`an dalam politik praktis, dengan menggunakan metode Tafsir Maudhu`i (Tematik).

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memperluas pandangan dan pengetahuan tentang penggunaan ayat-ayat Al-Qur`an dalam politik praktis, dengan menggunakan metode Tafsir

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021)

Maudhu`i (Tematik), serta dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Al-Qur'an.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dilakukan dengan harapan bisa menjadikan motivasi kepada masyarakat, dapat membuat masyarakat lebih antusias dalam mempelajari Al-Qur'an khususnya di dunia penafsiran, serta dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

c. Bagi Instansi

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menambah wawasan terlebih untuk Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Menjadikan salah satu hal yang berguna bagi akademik kampus, sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh mahasiswa UIN KHAS Jember.

E. Definisi Istilah

1. *Politik Praktis*

Secara bahasa, "politik" berasal dari Bahasa Yunani "polis" yang berarti negara, sedangkan "praktis" berarti pelaksanaan atau Tindakan nyata. Menurut Miriam Budiardjo, politik praktis adalah aktivitas politik yang bertujuan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan.⁹ Dalam penelitian ini, politik praktis

⁹ Miriam Budiardjo, "Dasar-dasar Ilmu Politik", (Jakarta: Gramedia, 2008), 15.

dibatasi pada aktivitas kampanye, pemilu, dan penggunaan ayat Al-Qur`an untuk kepentingan electoral di Indonesia.

2. *Tafsir Maudhu`i*

Secara Bahasa, “maudhu`i” berarti tematim atau berdasarkan tema tertentu. Menurut Quraish Shihab, tafsir maudhu`i adalah metode penafsiran Al-Qur`an dengan cara menghimpun seluruh ayat yang membahas satu tema tertentu, kemudian dianalisis secara komprehensif dan sistematis.¹⁰ Dalam penelitian ini, tafsir maudhu`i digunakan untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur`an yang berkaitan dengan politik praktis.

F. **Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup, Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini, berisi tentang latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan

Bab II Kajian Pustaka

Pada bab ini berisi tentang kajian penelitian terdahulu dan kajian teori yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian

¹⁰ Quraish Shihab, “Membumikan Al-Qur`an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat”, (Bandung: Mizan, 1999), 92.

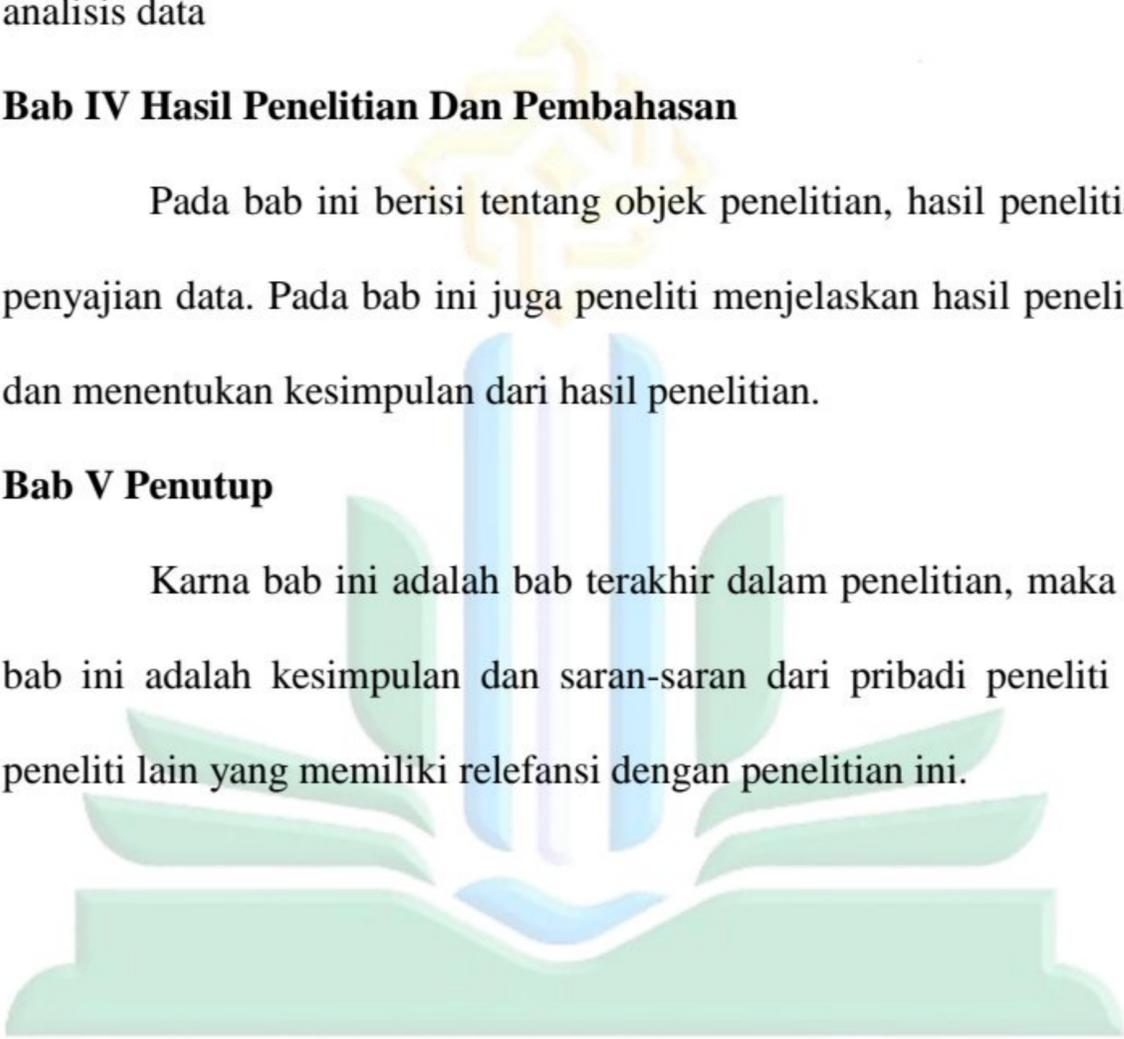
Pada bab ini, peneliti mendeskripsikan mengenai pendekatan dan jenis penelitiannya, terdiri juga dari Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang objek penelitian, hasil penelitian, dan penyajian data. Pada bab ini juga peneliti menjelaskan hasil penelitiannya dan menentukan kesimpulan dari hasil penelitian.

Bab V Penutup

Karna bab ini adalah bab terakhir dalam penelitian, maka isi dari bab ini adalah kesimpulan dan saran-saran dari pribadi peneliti kepada peneliti lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian pembahasan mengenai Penggunaan Ayat-Ayat Al-Qur`an dalam Politik Praktis dengan menggunakan Kajian Tafsir Maudhu`i masih belum ada yang meneliti bahkan selintas prodi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir. Oleh karena itu, peneliti berusaha mengumpulkan beberapa tulisan karya ilmiah yang hampir sama dengan ranah pembahasan dan teorinya sebagai bahan dalam kajian kepustakaan.

Pertama, Buku yang ditulis oleh M. Taufiq Rahman¹¹ “*Agama dan Politik Identitas dalam Kerangka Sosial*” terbitan tahun 2020. Karya tulis mahasiswa program S2 Program Studi Agama-Agama Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Buku ini menganalisis data dan informasi tentang hubungan antara agama dan politik identitas, menganalisis perkembangan sejarah agama dan politik identitas, serta membandingkan kasus-kasus berbeda tentang agama dan politik identitas. Buku ini membahas tentang hubungan antara agama dan politik identitas dalam konteks sosial, termasuk bagaimana agama dapat digunakan sebagai identitas politik dan bagaimana hal ini mempengaruhi dinamika sosial dan politik.¹²

¹¹ Alif Fahrurriza, “Wasiat Larangan MTQ Mbah Kyai M. Arwani Amin Berdasarkan Q.S al-Baqarah/2: 41 Menurut Persepsi Zuurriyah dan Santri Senior di Kudus”, *Skripsi*, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2017, 1.

¹² M. Taufiq Rahman. *Agama dan Politik Identitas dalam Kerangka Sosial*, *Buku*, Bandung, Juli 2020, 1.

Kedua, Buku yang ditulis oleh Eman Sulaeman¹³ “*Politik Identitas: Dalam Perspektif Al-Qur`an dan Teori Modern*” terbitan tahun 2022. Karya tulis dari seorang penulis dan peneliti Indonesia yang dikenal karena karya-karyanya tentang agama, sosial, dan politik. Buku ini membahas tentang analisis politik identitas dari perspektif Al-Qur`an dan teori modern, termasuk bagaimana identitas agama dan politik berinteraksi.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Imam Yahya dan Sahidin Sahidin¹⁴ “*Hubungan Agama dan Politik Praktis: Penerapan Yurisprudensi Islam Konstitusional dalam Kontekstual bagi Ulama di Indonesia*” terbitan tahun 2022. Jurnal ini berisi tentang penerapan yurisprudensi Islam konstitusional di Indonesia dan peran ulama dalam memahami dan menerapkannya. Metode yang digunakan adalah analisis yuridis, analisis kualitatif, dan studi kasus. Secara singkat, jurnal ini membahas tentang bagaimana yurisprudensi Islam konstitusional dapat diterapkan dalam konteks Indonesia dan bagaimana ulama dapat berperan dalam proses tersebut.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Muis¹⁵ “*Politik Identitas Perspektif Al-Qur`an (Kajian Tematik Ayat-Ayat Politik Identitas*

¹³ Eman Sulaeman, “Politik Identitas: Dalam Perspektif Al-Qur`an dan Teori Modern”, *Buku*, Jakarta Timur, September 2022, 1.

¹⁴ Imam Yahya dan Sahidin Sahidin, “*Hubungan Agama dan Politik Praktis: Penerapan Yurisprudensi Islam Konstitusional dalam Kontekstual bagi Ulama di Indonesia*”, *Jurnal*, vol. 78, no. 1, 2022, 1.

¹⁵ Muhammad Muis, “Politik Identitas Perspektif Al-Qur`an (Kajian Tematik Ayat-Ayat politik Identitas dalam Al-Qur`an)”, *Skripsi*, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur`an Jakarta, 2020, 14.

dalam Al-Qur`an)” terbitan tahun 2020. Karya tulis mahasiswa program S1 Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur`an Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) serta penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Penelitian ini menjelaskan bahwa adanya kelompok-kelompok yang menampakkan identitas agama akan menyuarakan suara mereka dengan ayat-ayat Al-Quran. Tanpa peduli kajian lebih lanjut mengenai ayat-ayat yang mereka bunyikan sudah terlebih dahulu dipahami ataupun belum, yang terpenting adalah legitimasi ayat ada di tangan mereka.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Delmus Puneri Salim¹⁶ “*Politik Islam Dalam Al-Qur`an (Tafsir Siyasa Surat Ali Imran Ayat 159)*” terbitan tahun 2016. Karya tulis mahasiswa program S1 IAIN Manado. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) serta penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Penelitian ini menjelaskan tentang politik Islam yang dikenal atau dipahami sebagai politik yang dilakukan oleh umat Islam dalam bentuk partai politik, mengagendakan Islam dalam peraturan kenegaraan sampai kepada penggunaan Islam untuk kepentingan pribadi, politik partai dan kelompok.

¹⁶ Delmus Puneri Salim, “Politik Islam Dalam Al-Qur`an (Tafsir Siyasa Surat Ali Imran Ayat 159)”, *Skripsi*, dalam jurnal: *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, IAIN Manado, vol. 1, no. 1, 2016, 43-52.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	M. Taufiq Rahman	<i>"Agama dan Politik Identitas dalam Kerangka Sosial"</i> terbitan tahun 2020.	Membahas keterkaitan agama dengan politik.	Peneliti menggunakan metode Tafsir Maudhu`I dalam menafsirkan ayat-ayat tentang politik.
2	Eman Sulaeman	<i>"Politik Identitas: Dalam Perspektif Al-Qur`an dan Teori Modern"</i> terbitan tahun 2022.	Penelitian ini sama-sama membahas tentang politik.	Peneliti menggunakan metode tafsir maudhu`i sedangkan buku Eman Sulaeman menggunakan teori modern.
3	Imam Yahya dan Sahidin	<i>"Hubungan Agama dan Politik Praktis: Penerapan"</i>	Membahas keterkaitan Agama dan	Terlihat dari segi pembahasan

	Sahidin	<i>Yurisprudensi Islam Konstitusional dalam Kontekstual bagi Ulama di Indonesia</i> ” terbitan tahun 2022	Politik Praktis	jauh berbeda, beliau membahas penerapannya sedangkan peneliti membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan politik praktis.
4	Muhamma d Muis	<i>“Politik Identitas Perspektif Al-Qur`an (Kajian Tematik Ayat-Ayat Politik Identitas dalam Al-Qur`an)”</i> terbitan tahun 2020	Penelitian ini sama-sama menggunakan kajian tematik dalam menafsirkan ayat-ayat tentang politik.	Penelitian ini membahas mengenai politik identitas menurut Al-Qur`an
5	Delmus Puneri Salim	<i>“Politik Islam Dalam Al-Qur`an (Tafsir Siyash Surat Ali Imran Ayat 159)”</i> terbitan tahun 2016	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai Islam yang dipergunakan sebagai kepentingan pribadi, politik	Penelitian ini membahas politik menurut Tafsir Siyash Surat Ali Imran Ayat 159

			partai dan kelompok.	
--	--	--	----------------------	--

B. Kerangka Teori

1. Tafsir Maudhu`i

Tafsir Maudhu`i adalah metode penafsiran Al-Qur`an dengan cara menghimpun seluruh ayat yang membahas satu tema tertentu, lalu dianalisis secara komprehensif dan sistematis. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman utuh mengenai suatu tema dalam Al-Qur`an, termasuk tema politik, keadilan, amanah, dan musyawarah. Menurut Quraish Shihab, tafsir maudhu`i memungkinkan peneliti untuk mengelompokkan ayat-ayat yang relevan, mengkaji konteks turunnya ayat (asbabun nuzul), serta menelaah penafsiran para mufassir klasik dan kontemporer terhadap tema yang diangkat.¹⁷

Langkah-langkah utama dalam tafsir maudhu`i meliputi:

- Menentukan tema (misal: politik dalam Al-Qur`an).
- Menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan tema tersebut.
- Mengkaji konteks dan penafsiran ayat-ayat tersebut menurut para mufassir.
- Menyimpulkan prinsip-prinsip tematik yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut.

¹⁷ Quraish Shihab, "Membumikan Al-Qur`an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Bandung: Mizan, 1999, 92

2. Politik Praktis dalam Perspektif Al-Qur`an

Secara normatif, Al-Qur`an mengatur prinsip-prinsip dasar politik yang seharusnya menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seperti keadilan (QS. An-Nisa: 58), musyawarah (QS. Asy-Syura: 38), amanah (QS. Al-Baqarah: 283), dan kejujuran (QS. Al-Ma`idah: 8).¹⁸ Dalam konteks politik praktis, ayat-ayat ini seringkali dikutip oleh aktor politik untuk meraih legitimasi dan simpati masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, penggunaan ayat-ayat Al-Qur`an dalam politik sering kali keluar dari konteks, bersifat simbolik, bahkan manipulatif demi kepentingan sesaat. Fenomena ini menimbulkan kesenjangan antara nilai ideal yang diajarkan Al-Qur`an dan realitas politik di Indonesia, sebagaimana diungkapkan dalam penelitian terdahulu dan hasil pengamatan penulis.

3. Integrasi Tafsir Maudhu`i dengan Analisis Politik Praktis

Dengan menggunakan metode tafsir maudhu`i, penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur`an yang sering digunakan dalam politik praktis, seperti QS. Al-Baqarah ayat 41, QS. An-Nisa ayat 58, dan QS. Al-Ma`idah ayat 8. Analisis dilakukan dengan:

- Mengkaji makna asli dan konteks ayat menurut para mufassir.
- Membandingkan makna ideal ayat dengan praktik penggunaannya dalam politik Indonesia.

¹⁸ Rosidatul Hasanah, "Komodifikasi Agama dalam Kampanye Pilpres 2019 (Analisis Pesan Kampanye di Situs Youtube)", *Skripsi*, IAIN Jember, 2020, 1.

- Mengkritisi penggunaan ayat dan menawarkan solusi agar penggunaan ayat tetap berada dalam koridor etika dan nilai-nilai Islam.

4. Penegasan Kesenjangan dan Aspek Kebaruan

Kerangka teori ini menegaskan adanya kesenjangan antara teori (nilai-nilai Al-Qur`an secara tematik) dan praktik (penggunaan ayat dalam politik praktis). Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan pendekatan tafsir maudhu`i yang belum banyak digunakan secara spesifik untuk menganalisis penyalahgunaan ayat-ayat Al-Qur`an dalam politik praktis di Indonesia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap teks dan makna ayat-ayat Al-Qur`an yang digunakan dalam politik praktis, bukan pada data kuantitatif dan statistik.

B. Metode Tafsir Maudhu`i (Tematik)

Metode utama yang digunakan adalah tafsir maudhu`i atau tafsir tematik. Metode ini dilakukan dengan cara:

- Menentukan tema utama, yaitu “politik praktis dalam Al-Qur`an”.
- Menghimpun seluruh ayat Al-Qur`an yang berkaitan dengan tema

politik, seperti QS. Al-Baqarah ayat 41, QS. Al-Baqarah ayat 42, QS. An-Nisa ayat 58, QS. Al-Ma`idah ayat 8, dan ayat-ayat lain yang relevan.

- Menganalisis makna, konteks, dan penafsiran ayat-ayat tersebut berdasarkan kitab-kitab tafsir (misal: Tafsir Al-Misbah, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Ath-Thabari) serta pendapat para mufassir klasik dan kontemporer.
- Mengkaji bagaimana ayat-ayat tersebut digunakan dalam praktik politik di Indonesia, baik secara normatif maupun empiris.

C. Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti menggunakan dua macam sumber data, yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu ayat-ayat Al-Qur`an yang berkaitan dengan tema politik, serta kitab-kitab tafsir utama (Al-Misbah, Ibnu Katsir, Ath-Thabari, dan lain-lain).
2. Sumber data sekunder atau sumber penunjangnya yaitu buku-buku, Jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, yaitu:

1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur`an terkait politik.
2. Mengumpulkan penafsiran dari berbagai kitab tafsir dan pendapat para ahli.
3. Mengumpulkan data dari penelitian terdahulu, artikel, dan regulasi yang relevan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan ayat-ayat Al-Qur`an yang digunakan dalam politik praktis.

2. Menganalisis makna dan konteks ayat-ayat tersebut berdasarkan tafsir maudhu`i.
3. Mengaitkan makna ideal ayat menurut para mufassir dengan praktik penggunaannya dalam politik di Indonesia.
4. Mengkritisi penyalahgunaan ayat dan menawarkan solusi agar penggunaan ayat tetap sesuai dengan etika dan nilai-nilai Islam.

F. Keabsahan Data

Pada tahap keabsahan data, penelitian ini bertujuan untuk memastikan kebenaran dan kredibilitas hasil yang telah dianalisis. Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik melacak kesesuaian hasil. Caranya adalah dengan membandingkan hasil penelitian yang sudah didapatkan dengan kajian teori yang telah dibahas sebelumnya dalam bab teori. Selain itu, peneliti juga memeriksa apakah hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian serupa yang sudah ada, terutama yang membahas tentang topik seperti penggunaan ayat-ayat Al-Qur`an dalam politik praktis, serta kajian Tafsir Maudhu`i dalam menafsirkan penggunaan ayat-ayat Al-Qur`an dalam politik praktis.

Dengan langkah ini, peneliti memastikan bahwa temuan-temuan yang diperoleh valid dan konsisten dengan penelitian sebelumnya, sehingga dapat dipercaya dan memiliki dasar yang kuat.

G. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Pra-Pengerjaan

Sebelum pada tahap awal ini, mencakup langkah-langkah seperti menetapkan judul penelitian berdasarkan konteksnya, merumuskan pertanyaan penelitian, menentukan area fokus, mengidentifikasi manfaat dari penelitian tersebut, dan melakukan pengecekan kesalahan penulisan sebelum diserahkan kepada dosen pembimbing untuk konsultasi.

2. Tahap Pengerjaan

Pada langkah selanjutnya, peneliti menetapkan sumber data yang akan dikumpulkan serta melakukan eksplorasi informasi yang relevan dengan topik penelitian.

3. Tahap Analisis Data

Dalam tahapan ketiga ini, peneliti melakukan pengumpulan data, mencari sumber rujukan, mengumpulkan informasi, dan mengidentifikasi berbagai elemen yang relevan dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan. Proses ini melibatkan pencarian secara sistematis terhadap literatur, dokumen, artikel, serta sumber informasi lain yang dapat memberikan kontribusi pada pemahaman mendalam terhadap topik penelitian yang dipilih.

4. Tahap Penelitian

Langkah terakhir melibatkan penyusunan hasil penelitian sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh instansi terkait, dengan tata letak yang teratur dan kronologis. Pada tahap ini, peneliti juga melakukan evaluasi ulang terhadap hasil penelitian. Apabila terdapat

kesalahan atau ketidakvalidan pada hasil penelitian, penelitian tersebut dapat diulang untuk memperbaiki kekurangan yang mungkin muncul.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Nilai-Nilai Politik Dalam Al-Qur`an

Dalam kepercayaan umat Islam, Al-Qur`an diyakini berisi informasi hampir segala aspek kehidupan, termasuk di dalamnya politik. Oleh karena itu Islam sering disebut dengan *way of life* bagi pemeluknya. Dalam aspek kepercayaan atau ibadah umumnya Al-Qur`an memberi penjelasan lebih rinci, akan tetapi dalam aspek kemasyarakatan dan politik ketatanegaraan penjelasan Al-Qur`an umumnya bersifat umum atau garis-garis besarnya saja. Hal ini dimaksudkan agar ajaran Islam selalu *up to date* selaras dengan perkembangan zaman.

Al-Qur`an maupun hadis secara eksplisit tidak menyebutkan apakah negara yang ingin dibentuk oleh umat Islam itu berbentuk republik atau kerajaan. Demikian pula apakah sistem yang dianut di suatu negara apakah sistem Presidensial atau Parlementer. Al-Qur`an juga tidak menyinggung tentang mekanisme kekuasaan yang harus dianut: apakah menggunakan pemisahan kekuasaan (*separation of power*), pembagian kekuasaan (*distribution of power*), atau penyatuan kekuasaan (*intergration of power*) antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga kekuasaan ini telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad ketika memimpin negara Madinah.

B. Amanah

Amanah (amanat atau *trust*) berasal dari bahasa Arab, artinya adalah adanya kepercayaan yang diberikan atau dititipkan, baik berupa materi (fisik) yang dapat dilihat atau non fisik kepada seseorang disertai dengan rasa *aman* sepanjang materi tersebut berada dengannya. Amanah dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai “pesan” atau “titipan” atau sesuatu yang dipercayakan (dititipkan) kepada orang lain.¹⁹ Oleh karena amanah merupakan titipan yang harus dijaga dengan baik, maka titipan tersebut harus diserahkan kembali dengan utuh kepada orang yang menitipkannya, sehingga setelah mengembalikan titipan tersebut, orang yang bersangkutan disebut orang yang dipercaya (al-amin). Dengan demikian, amanah adalah sikap seseorang yang dapat dipercaya karena ada kejujuran dan tanggung jawab.

Amanah dalam konteks politik berarti menjaga kepercayaan rakyat dan menjalankan tanggung jawab kepemimpinan dengan penuh integritas. QS. Al-Baqarah ayat 283 dan QS. An-Nisa ayat 58 mengingatkan pentingnya menunaikan amanah kepada yang berhak. Namun, dalam realitas politik Indonesia, amanah sering diabaikan, terlihat dari banyaknya kasus korupsi, pelanggaran janji politik, dan lemahnya akuntabilitas pejabat publik.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, edisi ketiga, 35.

C. Keadilan

Adil (*al-`dalah*) adalah menetapkan sesuatu secara proporsional dan objektif, atau menempatkan sesuatu pada tempatnya.²⁰ Kata adil dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan “tidak berat sebelah, tidak memihak, sama berat, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, tidak sewenang-wenang.”²¹ Islam memerintahkan umatnya agar menjadikan keadilan sebagai prinsip dasar dalam bersikap dan memperlakukan orang lain, karena realitasnya keadilan berimplikasi pada terciptanya keamanan dan ketentraman hidup.²²

Keadilan merupakan nilai utama yang ditekankan Al-Qur`an dalam urusan politik dan pemerintahan. QS. An-Nisa ayat 58 menegaskan “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...” Nilai keadilan ini menuntut setiap pemimpin dan pelaku politik untuk bersikap objektif, tidak diskriminatif, dan menempatkan hak setiap orang secara proporsional. Dalam praktik politik di Indonesia, nilai keadilan seringkali hanya dijadikan jargon, sementara implementasinya masih jauh dari harapan, terbukti dari masih maraknya praktik diskriminasi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan.

²⁰ A. Zaki Badawiy, *A Dictionary of The Social Sciences* (Beirut: Library Du Liban), 1982 M, 232.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, edisi ketiga, 8

²² Saidiy Abu Jayb, *Dirasat Fiy Manhaj al-Islam al-Siyasiy*, 765.

Nilai keadilan ini dianggap penting dalam sistem politik Islam karena beberapa hal. Pertama, bahwa keadilan merupakan sifat Allah SWT yang harus menjadi cermin bagi pola laku seluruh umat di dunia dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam bidang politik pemerintahan. Kedua, Islam mengajarkan bahwa keadilan adalah kebenaran, dan kebenaran juga salah satu nama Allah juga. Jadi antara keadilan dan kebenaran dapat diibaratkan seperti dua koin mata uang yang kedua sisinya sama pentingnya. Sebaliknya koin tidak memiliki makna tanpa kedua sisinya tersebut.

D. Musyawarah

Musyawarah (*al-syura* atau *consultation*) sinonim dengan istilah sidang, urun rembuk atau konsultasi tentang bagaimana menyelesaikan masalah yang melibatkan orang banyak. Dalam konteks ini, Al-Qur`an menempatkan musyawarah (*syura*) sebagai dasar dalam mencari penyelesaian masalah yang menyangkut kehidupan orang banyak, seperti urusan politik, ekonomi, pendidikan, kemasyarakatan dan sebagainya. Musyawarah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan “pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perembukan, perundingan.”²³

Prinsip musyawarah tercantum dalam QS. Asy-Syura ayat 38, “...dan urusan mereka (diputuskan) dengan musywarah di antara mereka...” Musyawarah merupakan mekanisme pengambilan keputusan

²³ Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, edisi ketiga, 768.

kolektif yang mengedepankan partisipasi dan keterbukaan. Dalam konteks demokrasi Indonesia, musyawarah seringkali hanya formalitas, sementara keputusan politik kerap didominasi oleh elit tertentu tanpa melibatkan suara rakyat secara substansial.

Musyawarah memiliki kedudukan yang penting dalam sistem politik kenegaraan. Nilai penting musyawarah tersebut dapat dilihat dari dalam beberapa keunggulannya. Pertama, nilai musyawarah mengedepankan semangat persaudaraan dan kebersamaan, bukan kemenangan. Oleh sebab itulah dalam bermusyawarah yang diutamakan adalah sejauh mana hasil musyawarah itu dapat memenuhi harapan publik masyarakat banyak. Kedua, nilai musyawarah lebih lama bertahan, karena keputusan yang dihasilkan didukung secara bersama-sama oleh seluruh peserta musyawarah dan pelibatan sebagian besar peserta musyawarah. Ketiga, nilai musyawarah lebih mengedepankan nilai pemikirannya atau kualitas idenya, dari pada sosok pribadi peserta musyawarahnya.

E. Persamaan

Konsep persamaan (*al-musawa* atau *egalitarian*) merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam merekonstruksi kehidupan masyarakat dan negara, di mana sistem-sistem politik modern dan konemporer mendasarkan pada prinsip ini, meskipun dalam penerapannya berbeda. Persamaan artinya bahwa setiap individu dalam masyarakat adalah sama, sama di hadapan undang-undang, di dalam hak, kewajiban, kemerdekaan dan tanggung jawab. Oleh karena itu tidak ada perbedaan

dalam hal ini semua hanya karena perbedaan suku, keturunan, bahasa, warna kulit, keyakinan (akidah), pejabat tinggi atau rendah, semuanya sama.²⁴

Oleh karena itu, persamaan di hadapan hukum dan undang-undang merupakan dasar yang sangat berarti bagi terealisasinya kondisi yang kondusif dan nyaman. Kondisi ini seperti disebutkan di atas akan wujud jika adanya penghormatan terhadap persamaan. Oleh karenanya, jika dasar persamaan ini tidak terwujud, maka kondisi nyaman dan kondusif sulit untuk direalisasikan, karena hal ini akan berdampak pada munculnya sikap egoistik dan sikap semena-mena dari kalangan para pembesar yang melakukan tindak kejahatan, sementara orang-orang kecil yang melakukan tindak kejahatan akan menghadapi proses pengadilan, kondisi ini akan berakibat terjadinya ketidakadilan.

Prinsip persamaan yang diajarkan Islam inilah yang menjadikan seseorang memiliki sikap yakin diri (*confident*) dan sikap tawadhu`, yaitu sikap yang tidak menunjuk-nunjuk prestasi, tidak sombong, tidak egoistik, tidak feodalistik. Implikasi dari semua ini seseorang dapat menerima dan mengapresiasi orang lain, tidak memandang rendah atau memandang kecil orang lain. Jika kondisi ini tercipta dalam kehidupan masyarakat, maka akan terwujud kehidupan yang nyaman karena diwarnai oleh sikap kebersamaan dan gotong royong, transparan dan penuh kesadaran.

²⁴ Muhammad Salim al-Awwa, *Fiy al-Nidzam al-Siyasah Li al-Daulah al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1989 M. / 1310 H, 226.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika politik tanpa dasar moral (akhlak) akan menjadi permainan kotor melalui berbagai cara yang bisa dilakukan, tidak penting halal atau haram itu urusan agama. Hal ini bisa ditengarai, di mana individu-individu yang selalu mencari-cari jabatan atau kekuasaan melalui cara-cara yang tidak mengenal halal-haram, persaingan yang tidak sehat antara satu dengan yang lainnya untuk memperoleh kedudukan atau memperbesar kekuasaan, atau untuk mempertahankan jabatan yang dianggapnya sebagai hak istimewa melalui penggabungan formasi, manipulasi atau menyingkirkan rival. Itu semua dilakukan tanpa mengkalkulasikan dampak positif atau negatif, yang penting tercapai tujuan.²⁵ Dalam kondisi seperti ini sebenarnya telah terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, baik disadari ataupun tidak, dan ini sebagai akibat dari pemahaman politik yang tidak benar, bahwa politik itu untuk mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Jika yang terjadi seperti ini, maka sesungguhnya politik akan terjebak pada permainan kotor, manipulatif dan berujung akan menghalalkan segala cara demi tercapainya tujuan, yaitu kekuasaan. Oleh karena itu, ketika kekuasaan hanya menjadi orientasi politik dan hampa dari tujuan-tujuan untuk terciptanya kebaikan bersama, maka politik dan kekuasaan itu akan menjadi brutal, otoriter, kejam, dan tidak manusiawi.

²⁵ Bernard Crick, *"In Defence of Politics"*, London: Pelican Books, 1964, 16.

A. Penafsiran Serta Analisis Terkait Penggunaan Ayat-Ayat Politik

Praktis

1. Identifikasi Ayat-ayat yang Sering Digunakan dalam Politik

Praktis

Dalam politik praktis di Indonesia, sejumlah ayat Al-Qur'an sering dikutip oleh aktor politik, terutama saat kampanye atau peristiwa politik penting. Beberapa ayat yang kerap digunakan antara lain:

a. QS. Al-Baqarah: 41

وَأْمِنُوا بِمَا آتَيْنَاكُمْ مَصَدَقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا فَاصْبِرُوا
تَشْتَرُوا بِآيَاتِنَا ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ

Artinya: “Dan berimanlah kamu kepada apa (Al-Qur'an) yang telah Aku turunkan sebagai pembener bagi apa yang ada pada kamu (Taurat) dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga murah, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa.”

- Asbabun Nuzul QS. Al-Baqarah: 41

Menurut Riwayat dari Ibnu Abbas yang dikutip oleh Al-Wahidi dan ats-Tsa'labi, ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, mereka sebenarnya telah mengetahui dari kitab Taurat bahwa akan datang seorang nabi terakhir dari keturunan

Ismail, dan ciri-cirinya sangat jelas disebutkan.²⁶ Namun, para pemuka agama Yahudi justru menolak dan menyembunyikan kebenaran tersebut karena khawatir kehilangan pengaruh dan keuntungan duniawi yang selama ini mereka dapatkan dari jabatan keagamaan mereka.²⁷

- Penafsiran QS. Al-Baqarah: 41

Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat ini merupakan peringatan keras agar manusia tidak memperjualbelikan ayat Allah untuk kepentingan duniawi. Ayat ini menyoroti perilaku sebagian orang yang memanipulasi wahyu demi keuntungan pribadi, baik dalam bentuk materi maupun kekuasaan. Dalam konteks politik, ayat ini menjadi peringatan agar ayat-ayat Al-Qur'an tidak dijadikan alat legitimasi politik atau komoditas kampanye semata, melainkan harus dijaga kemurnian dan kehormatannya.²⁸

Ath Thabari menjelaskan bahwa yang dimaksud “menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga murah” adalah menggunakan wahyu Allah untuk mendapatkan keuntungan duniawi yang hina, seperti jabatan atau kekuasaan. Ia menekankan bahwa perilaku ini adalah bentuk pengkhianatan

²⁶ Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz, “*Tafsir Al-Muyasar Surat Al-Baqarah Ayat 41-42*”, *Artikel*, 06 Juli 2020, <https://binbaz.or.id/category/artikel/tafsir-al-muyasar-surat-al-baqarah-ayat-41-46>

²⁷ Learn Qur'an Tafsir, “*Al-Baqarah Ayat 41*”, <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-baqarah/ayat-41#>

²⁸ Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Misbah*”, jilid 1, 176-177.

terhadap amanah wahyu, dan pelakunya diancam dengan kemurkaan Allah.²⁹

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini sebagai larangan keras kepada ahli kitab dan siapa saja agar tidak menjual ayat Allah demi kepentingan dunia. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menegaskan bahwa tindakan semacam ini termasuk bentuk penyelewengan agama yang sangat tercela, baik dilakukan oleh ulama, pemimpin, maupun politisi.³⁰

b. QS. An-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...”

• Asbabun Nuzul QS. An-Nisa: 58

Surah An-Nisa' ayat 58 turun berkenaan dengan peristiwa penaklukan Makkah (Fathu Makkah). Setelah Rasulullah SAW berhasil memasuki Makkah, beliau memanggil Utsman bin Thalhah, penjaga kunci Ka'bah saat itu, untuk menyerahkan kunci Ka'bah kepadanya.³¹ Utsman

²⁹ Ath Thabari, “*Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*”, jilid 1, 368-369.

³⁰ Ibnu Katsir, “*Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*”, jilid 1, 106-107.

³¹ Kalam.Al-Qur'an.ai, “*Asbabun An-Nisa` Ayat 58*”, <https://kalam.alquran.ai/asbabun-an-nisa/ayat-58>.

awalnya enggan memberikan kunci karena tidak mengetahui bahwa yang meminta adalah Rasulullah. Ketika akhirnya kunci diserahkan, Al-Abbas, paman Nabi, mengusulkan agar tugas penjagaan kunci Ka'bah digabungkan dengan tugas pemberian air zamzam yang selama ini dipegang keluarganya.³² Rasulullah menolak usulan tersebut dan Allah menurunkan ayat ini yang menegaskan pentingnya menunaikan amanah kepada yang berhak dan menegakkan keadilan dalam memutuskan perkara.³³

- Penafsiran QS. An-Nisa: 58

Quraish Shihab menafsirkan ayat ini sebagai dasar etika kepemimpinan dan pemerintahan. Pemimpin wajib berlaku adil dan menjaga amanah rakyat. Ayat ini menuntut setiap penguasa untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak. Dalam konteks politik, ayat ini menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan kekuasaan.

Ath Thabari menjelaskan bahwa amanah dalam ayat ini mencakup segala bentuk tanggung jawab, baik dalam urusan agama maupun dunia. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan amanah dan keadilan merupakan syarat mutlak tegaknya masyarakat yang sejahtera. Pengkhianatan terhadap amanah,

³² Alislamu, "Asbabun Nuzul Surah an-Nisaa` Ayat 58 s/d 83", 05 April 2013, <https://www.alislamu.com/4713/asbabun-nuzul-surah-an-nisaa-ayat-58-sd-83/>

³³ Laduni, "Asbabun Nuzul Surat An-Nisa` Ayat 58 – Imam As Suyuthi : Ustman Diberi Kepercayaan Agar Memegang Kunci Ka`bah", <https://www.laduni.id/asbabulnuzul/319/asbabun-nuzul-surat-an-nisa-ayat-58-imam-as-suyuthi>

termasuk dalam jabatan politik, adalah dosa besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Ibnu Katsir menekankan bahwa ayat ini adalah perintah langsung dari Allah agar setiap urusan, terutama yang menyangkut kepentingan publik, harus dijalankan dengan penuh amanah dan keadilan. Ia mengingatkan bahwa keadilan adalah inti dari syariat Islam dan pengkhianatan terhadap amanah adalah bentuk kedzaliman.

c. QS. Al-Ma'idah: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَٰی ۚ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ إِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil...”

• Asbabun Nuzul QS. Al-Ma'idah: 8

Surah Al-Maidah ayat 8 turun ketika Rasulullah SAW menghadapi ancaman pembunuhan dari kaum Yahudi Bani Nadhir di Madinah. Mereka merancang konspirasi untuk membunuh Nabi dengan harapan menghentikan dakwah Islam. Namun, Allah SWT memberi tahu Nabi tentang rencana tersebut sehingga beliau dan para sahabat dapat mengambil langkah antisipasi. Setelah itu, Rasulullah memerintahkan Bani

Nadhir untuk meninggalkan Madinah, tetapi mereka menolak dan berlindung di benteng-benteng mereka.³⁴ Terjadi pengepungan selama enam malam yang membuat kondisi mereka memburuk hingga akhirnya mereka menyerah dan memohon izin pergi membawa harta mereka. Dalam situasi ketegangan ini, sebagian kaum Muslimin ingin melakukan pembalasan yang keras, bahkan ada usulan hukuman yang kejam. Allah SWT menurunkan ayat ini untuk melarang umat Islam berlebihan dalam membalas dendam dan menegaskan pentingnya menegakkan keadilan tanpa memandang kebencian terhadap suatu kaum.³⁵

- Penafsiran QS. Al-Ma'idah: 8

Quraish Shihab menegaskan bahwa keadilan adalah inti dari ketakwaan dan harus ditegakkan tanpa memandang latar belakang, kelompok, atau kepentingan. Ayat ini mengingatkan agar kebencian atau persaingan politik tidak menjadi alasan untuk berlaku tidak adil. Dalam konteks politik, ayat ini menuntut integritas dan objektivitas dalam pengambilan keputusan, baik oleh pemimpin maupun masyarakat.

Ath Thabari menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan pentingnya menegakkan keadilan bahkan terhadap lawan

³⁴ Zaini Dahlan dkk, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II Juz 4-5-6*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waka, 1991), h. 380.

³⁵ Nuonline, "Tafsir Surat Al-Ma'idah Ayat 8: Perintah Menegakkan Keadilan di Tengah Konflik Kepentingan", 29 agustus 2024, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-ma-idah-ayat-8-perintah-menegakkan-keadilan-di-tengah-konflik-kepentingan-sX0pS>

politik atau musuh. Ia menekankan bahwa keadilan adalah hak semua orang, dan kebencian tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan kezaliman atau diskriminasi dalam politik.

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini sebagai perintah untuk selalu bersikap adil dalam segala keadaan, baik terhadap kawan maupun lawan. Ia menegaskan bahwa keadilan adalah bagian dari ketakwaan dan menjadi syarat utama diterimanya amal perbuatan di sisi Allah.

2. Praktik Penggunaan Ayat dalam Politik Praktis

Dalam praktiknya, ayat-ayat di atas sering digunakan dalam pidato, kampanye, atau debat politik untuk membangun citra religius dan memperoleh simpati. Namun, berdasarkan pengamatan dan data penelitian terdahulu (Hasanah, 2020; Al-Qurtuby, 2018), penggunaan ayat-ayat ini cenderung bersifat simbolik, retorik, bahkan manipulatif. Ayat dikutip tanpa penjelasan konteks, dan seringkali hanya diambil sebagian untuk mendukung kepentingan politik tertentu.

3. Analisa Penulis

Berdasarkan penafsiran dari Al-Misbah, Ath Thabari, dan Ibnu Katsir, dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat politik dalam Al-Qur'an mengandung pesan moral yang sangat kuat tentang keadilan, amanah, musyawarah, persamaan dan larangan memperjualbelikan ayat Allah untuk kepentingan duniawi. Namun, dalam praktik politik di Indonesia, ayat-ayat tersebut lebih sering dijadikan alat legitimasi

kekuasaan daripada pedoman etika. Kesenjangan antara makna ideal ayat dan praktik politik harus menjadi refleksi bersama agar nilai-nilai Al-Qur'an benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan politik, bukan sekadar dijadikan simbol atau alat retorik.

Kemudian berdasarkan kajian tafsir maudhu'i dan pengamatan terhadap praktik politik di Indonesia, penulis menilai bahwa:

- Terjadi Kesenjangan antara makna ideal ayat-ayat Al-Qur'an dengan praktik penggunaannya dalam politik praktis. Ayat yang seharusnya menjadi pedoman etika dan moralitas justru sering dijadikan alat legitimasi kekuasaan.
- Penyalahgunaan Ayat berpotensi menimbulkan bias penafsiran di masyarakat, polarisasi politik, dan bahkan konflik horizontal.
- Regulasi Sudah Ada, seperti UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 280 yang melarang eksploitasi agama dalam kampanye, namun implementasinya masih lemah.
- Kurangnya Literasi Tafsir di kalangan politisi dan masyarakat menyebabkan ayat-ayat Al-Qur'an mudah disalahgunakan dan dimaknai secara parsial.

Penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an dalam politik praktis di Indonesia masih jauh dari makna ideal yang diajarkan Al-Qur'an, seperti contoh kasus pada Pemilu 2019, beberapa kandidat dan tim sukses mengutip QS. Al-Ma'idah: 8 dalam kampanye mereka untuk menonjolkan citra sebagai pemimpin

adil dan bertakwa. Namun, dalam praktik pemerintahan, kebijakan yang diambil tidak selalu mencerminkan nilai keadilan sebagaimana ditekankan dalam ayat tersebut. Diperlukan pemahaman, pengawasan, dan edukasi agar ayat-ayat suci tidak lagi disalahgunakan untuk kepentingan politik sesaat.

4. Solusi dan Rekomendasi

Agar penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an dalam politik tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam, penulis merekomendasikan:

- **Peningkatan Literasi Tafsir:** Edukasi kepada masyarakat dan politisi tentang penafsiran ayat secara utuh dan kontekstual.
- **Penguatan Etika Politik:** Menjadikan nilai-nilai Al-Qur'an sebagai pedoman perilaku politik, bukan sekadar alat retorik.
- **Pengawasan dan Sanksi Tegas:** Penegakan regulasi secara konsisten terhadap pelanggaran penggunaan ayat dalam politik.

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Quran memuat nilai-nilai politik yang luhur, seperti keadilan, musyawarah, amanah, kejujuran, dan persamaan, yang seharusnya menjadi landasan utama dalam kehidupan politik. Namun, dalam praktiknya, ayat-ayat Al-Quran sering digunakan secara parsial dan tidak sesuai konteks oleh sebagian pihak untuk kepentingan politik praktis, sehingga makna aslinya menjadi bias dan manipulatif. Analisis tafsir maudhu'i terhadap ayat-ayat yang kerap digunakan dalam politik, seperti QS. Al-Baqarah ayat 41, QS. An-Nisa' ayat 58, dan QS. Al-Maidah ayat 8, menegaskan bahwa Al-Quran menuntut integritas, keadilan, serta larangan keras terhadap penyalahgunaan wahyu untuk kepentingan duniawi. Oleh karena itu, penafsiran dan penggunaan ayat-ayat Al-Quran dalam ranah politik harus dilakukan secara komprehensif, objektif, dan berlandaskan etika, agar nilai-nilai Al-Qur'an tetap terjaga dan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyarankan agar para politisi, tokoh agama, dan masyarakat memperkuat literasi Al-Quran dengan pendekatan tematik dan kontekstual, khususnya terkait ayat-ayat yang berhubungan dengan politik dan kehidupan sosial. Diperlukan

edukasi berkelanjutan melalui lembaga pendidikan, media, dan forum keagamaan untuk menanamkan pemahaman tentang nilai-nilai politik dalam Al-Quran secara utuh dan bertanggung jawab. Selain itu, perlu adanya regulasi dan pengawasan yang lebih tegas untuk mencegah eksploitasi ayat-ayat suci dalam politik praktis. Penulis juga mendorong riset lanjutan mengenai tafsir ayat-ayat politik agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh politisasi agama, serta mampu menempatkan Al-Qur`an sebagai sumber inspirasi moral dan etika, bukan sekadar alat legitimasi politik. Dengan demikian, diharapkan tercipta kehidupan politik yang adil, bermartabat, dan selaras dengan nilai-nilai universal Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Awwa, Muhammad Salim, "*Fiy al-Nidzam al-Siyasah Li al-Daulah al-Islamiyah*", Kairo: Dar al-Syuruq, 1989 M. / 1310 H, 226.
- Alislamu, "*Asbabun Nuzul Surah an-Nisaa` Ayat 58 s/d 83*", 05 April 2013, <https://www.alislamu.com/4713/asbabun-nuzul-surah-an-nisaa-ayat-58-sd-83/>
- Al-Qurtuby, "Sejarah Politik Politisasi Agama dan Dampaknya di Indonesia". MAARIF, 13(2) 2018, 43–54.
- Anggraeni, Indri, "*Penggunaan Simbol Agama Dalam Kampanye Pemilihan Umum Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif*", Skripsi, Mahasiswa Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021, 5-6.
- Ath Thabari, "*Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*", jilid 1, 368-369.
- Badawiy, A. Zaki, "*A Dictionary of The Social Sciences*", Beirut: Library Du Liban, 1982 M, 232.
- Budiardjo, Miriam, "*Dasar-dasar Ilmu Politik*", Jakarta: Gramedia, 2008, 15.
- Budiyono, Zaenal A., "*Memimpin Di Era Politik Gaduh*", Jakarta: Dcsc Publishing, 2012, I.
- Crick, Bernard, "*In Defence of Politics*", London: Pelican Books, 1964, 16.
- Dahlan, Zaini, "*Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II Juz 4-5-6*", Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waka, 1991, 380.
- Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Jakarta: Balai Pustaka, 2005, edisi ketiga, 35.
- Fahrurriza, Alif, "*Wasiat Larangan MTQ Mbah Kyai M. Arwani Amin Berdasarkan Q.S al-Baqarah/2: 41 Menurut Persepsi Ziurriyah dan Santri Senior di Kudus*", Skripsi, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2017, 1.
- Hasanah, Rosidatul, "*Komodifikasi Agama Dalam Kampanye Pilpres 2019 (Analisis Pesan Kampanye Di Situs Youtube)*", Skripsi, Mahasiswa Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020, 1.
- Ibnu Katsir, "*Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*", jilid 1, 106-107.
- Jayb, Saidiy Abu, "*Dirasat Fiy Manhaj al-Islam al-Siyasiy*", 765.
- Kalam.Al-Qur'an.ai, "*Asbabun An-Nisa` Ayat 58*", <https://kalam.alquran.ai/asbabun-an-nisa/ayat-58>.
- Laduni, "*Asbabun Nuzul Surat An-Nisa` Ayat 58 – Imam As Suyuthi : Ustman Diberi Kepercayaan Agar Memegang Kunci Ka`bah*", <https://www.laduni.id/asbabulnuzul/319/asbabun-nuzul-surat-an-nisa-ayat-58-imam-as-suyuthi>
- Learn Qur'an Tafsir, "*Al-Baqarah Ayat 41*", <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-baqarah/ayat-41#>
- Muis, Muhammad, "*Politik Identitas Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik Ayat-Ayat Politik Identitas dalam Al-Qur'an)*", Skripsi, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2020, 14-15.

- Nuonline, "Tafsir Surat Al-Ma'idah Ayat 8: Perintah Menegakkan Keadilan di Tengah Konflik Kepentingan", 29 agustus 2024, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-ma-idah-ayat-8-perintah-menegakkan-keadilan-di-tengah-konflik-kepentingan-sX0pS>
- Nuraeni, Leni, "Imbalan Ceramah Agama Kajian (Penafsiran Q.S. Al-Baqarah/2: 41 Menurut Ibn Katsir Dan Sayyid Qutb)", Skripsi, UIN Jakarta, 2017, 1.
- Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz, "Tafsir Al-Muyasar Surat Al-Baqarah Ayat 41-42", Artikel, 06 Juli 2020, <https://binbaz.or.id/category/artikel/tafsir-al-muyasar-surat-al-baqarah-ayat-41-46>
- Rahman, M. Taufiq. "Agama dan Politik Identitas dalam Kerangka Sosial", Buku, Bandung, Juli 2020, 1.
- Sahidin, Imam Yahya dan Sahidin, "Hubungan Agama dan Politik Praktis: Penerapan Yurisprudensi Islam Konstitusional dalam Kontekstual bagi Ulama di Indonesia", Jurnal, vol. 78, no. 1, 2022, 1.
- Salim, Delmus Puneri, "Politik Islam Dalam Al-Qur'an (Tafsir Siyasah Surat Ali Imran Ayat 159)", Skripsi, dalam jurnal: Aqlam: Journal of Islam and Plurality, IAIN Manado, vol. 1, no. 1, 2016, 43-52.
- Shihab, Quraish, "Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat", Bandung: Mizan, 1999, 92.
- Sulaeman, Eman, "Politik Identitas: Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Teori Modern", Buku, Jakarta Timur, September 2022, 1.
- Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Jember: UIN KHAS Jember, 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisa Bilah Izzah Kholilah
NIM : 204104010025
Program Studi : Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak siapapun.

Jember, 28 Februari 2025

Saya yang menyatakan



Annisa Bilah Izzah Kholilah
Nim 204104010025

Biodata Penulis**A. Identitas Penulis**

Nama : Annisa Billah Izzah Kholilah
Tempat/Tanggal Lahir : Situbondo, 18 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Raya Banyuwangi, RT.03/RW.05, Desa
Seletreng, Dusun Salasaan, Kec. Kapongan,
Kab. Situbondo
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir

B. Riwayat Pendidikan

1. TK PGRI 2 Seletreng
2. SDN 1 Dawuhan
3. SMPN 1 Situbondo
4. SMAN 2 Situbondo